

Demokrasi Semu di Singapura Pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew (1959 - 1990)

Febbie Ardilla Antriksa

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
NIM. 0921105027
email: febbieardilla@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to look at the democratic system that occurred in Singapore during Lee Kuan Yew era. Singapore as a small but well developed country in Southeast Asia is well-known with its parliamentary democratic system. But, during Lee Kuan Yew era, the implementation of democratic system is not a pure democratic as espoused by west. Singapore has a multi-party system but dominated by People's Action Party (PAP) that Lee Kuan Yew established. Through the hybrid regime that affected by Asian Values and the implementation of Internal Security Act, Lee Kuan Yew, with his party developed his own version of democracy.

Keywords: *democracy, Singapore, Lee Kuan Yew, hybrid regime*

1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan konsep Barat yang mengedepankan pemerintahan oleh rakyat dan pengaruhnya telah disebarkan hampir ke seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara. Namun di tengah gempuran pengaruh demokrasi, beberapa negara di Asia Tenggara memilih secara terang-terangan untuk menolak paham tersebut dan ada pula beberapa negara yang secara semu menjalankan sistem demokrasi. Salah satu negara yang menjalankan sistem demokrasi secara semu adalah Singapura. Negara

Singapura dikenal oleh masyarakat dunia sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi parlementer tetapi dalam praktek politik dan pemerintahannya terutama pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew, Singapura lebih kental menganut sistem otoriter. Hal ini dapat dilihat dari sistem Asian Value yang dikenalkan oleh Lee Kuan Yew yang kemudian dijadikan tameng untuk membatasi kebebasan masyarakatnya kemudian penerapan *Internal Security Act* yang dijadikan pembenaran bagi pemerintah berkuasa untuk mengontrol masyarakat dan meredam pertumbuhan partai oposisi yang ada di Singapura.

Berdasarkan hal tersebut maka kami akan menjawab pertanyaan tentang “ Bagaimana sistem demokrasi yang terjadi di Singapura pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew?” dengan menggunakan teori negara otoriter, konsep Asian Value dan sumber hukum dari *Internal Security Act* yang diperoleh melalui studi pustaka.

2. Singapura dan Lee Kuan Yew

Singapura merupakan salah satu negara yang kecil wilayahnya di Asia Tenggara dan tidak kaya akan sumber daya alam. Negara kecil ini merupakan wilayah bekas jajahan Inggris dan kini tergabung dalam persemaikmuran Inggris bersama dengan tetangganya, Malaysia. Pada tahun 1963-1965, wilayah Singapura masih merupakan bagian dari federasi Malaysia namun akhirnya pada tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari federasi dan menyatakan diri sebagai negara yang independen dengan nama

resmi *Republic of Singapore* di bawah pemerintahan perdana menteri Lee Kuan Yew.

Lee Kuan Yew terpilih bersama dengan partai yang dibentuknya yaitu People's Action Party (PAP) yang merupakan partai dominan di Singapura pada tahun 1959. Saat masa pemerintahannya, Lee Kuan Yew menciptakan banyak kemajuan bagi Singapura. Singapura yang awalnya merupakan negara kecil dan miskin sumber daya alam dapat dibuatnya menjadi negara maju dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki secara maksimal dan mengembangkan strategi ekonomi berupa substitusi impor melalui industri dalam negeri sebagai penunjang perekonomian negaranya.

Lee Kuan Yew merupakan pemimpin yang dapat dikatakan berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Beliau meninggalkan kursi perdana menteri dengan catatan GDP Singapura sebesar US\$14,000 (McCharty, 1999). Semua itu diraih dengan penerapan disiplin politik yang tinggi pada pemerintah Singapura seperti membudayakan pemerintahan tanpa korupsi. Selain itu, Lee juga merupakan pemimpin yang mendukung dan menerapkan pemikiran Machiavelli untuk menjadi pemimpin yang ditakuti. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya, yaitu :

“Between being loved and being feared, I have always believed Machiavelli was right. If nobody is afraid of me, I'm meaningless. When I say something, to make it easier for me to govern, I have to be taken very seriously. So when I say “please don't do that”, you do it, I have to punish you because I was not joking when I said that. And when I punish, it's to punish publicly. And people will know the next time, if you want to do that when he said “no, don't do it”, you must be prepared for a brutal encounter. . . . What the crowd thinks of me from time to time, I consider totally irrelevant . . .”

(Lee Kuan Yew in Han Fook Kwang, dikutip oleh McCharty, 2006)

Oleh karena pilihan Lee untuk ditakuti tersebut, maka rezim pemerintahannya juga dikenal sebagai rezim yang otoriter. Otoritarianisme ala Lee Kuan Yew dalam memerintah Singapura juga dapat dilihat dari masa jabatannya yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, menciptakan dominasi satu partai yaitu PAP ditengah sistem kepartaian yang multipartai di Singapura (Neher dan Marlay, 1995: 133-134), mengekang kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat serta mengekang kebebasan media dengan langkah memegang kontrol terhadap pencetakan dan penyebaran media kepada masyarakat.

3. *Asian Values dan Hybrid Regime di Singapura*

Lee Kuan Yew, selain sebagai pemimpin negara yang ditakuti dan dihormati juga merupakan pemimpin yang mencetuskan konsep demokrasi berbasis *Asian Values* untuk diterapkan di Singapura. *Asian Values* merupakan konsep nilai yang berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap nilai demokrasi barat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Asia. Konsep *Asian Values* mengemukakan bahwa budaya asia khususnya asia timur telah mempengaruhi tatanan sosial-politik yang dapat dijelaskan melalui hal-hal berikut (Mauzy, 2006: 49) :

- a. Pencapaian stabilitas politik melalui tatanan, harmoni dan penghormatan terhadap otoritas.
- b. Kemajuan ekonomi yang diperoleh melalui kerja keras, hemat dan rajin menabung.
- c. Kohesi sosial berupa komunitarianisme.

Selain hal-hal tersebut, *Asian Values* oleh Caoili (2005 :11) juga dijelaskan memiliki dasar lainnya, yaitu :

- a. Menempatkan kepentingan atau prioritas masyarakat di atas kepentingan individu.
- b. Mementingkan adanya ikatan emosional yang berdasarkan hubungan timbal balik hak dan kewajiban seperti dalam keluarga.
- c. *Power as legitimated by virtue*. Hal ini menyebabkan ketiadaan dari mekanisme umpan balik dalam sistem politik dan sistem *checks and balances* yang dilembagakan.
- d. *Asian Values* merdasarkan pada etika Konfusianisme yang beranggapan bahwa mereka yang berkuasa terpilih karena alasan-alasan moral sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa.

Dasar-dasar *Asian Values* di atas lebih mengarahkan sebuah pemerintahan kepada bentuk yang lebih otoriter dibandingkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, Singapura saat masa pemerintahan Lee Kuan Yew yang menerapkan nilai-nilai lokal Asia dalam kepemimpinannya dinilai menganut sistem otoritarianisme.

Otoritarianisme Lee Kuan Yew di Singapura dapat dilihat dari beberapa hal lainnya selain penerapan *Asian Values* yang dijadikan pembenaran bagi berlangsungnya rezim otoriter tersebut. Hal yang pertama dan paling terlihat adalah mekanisme penciptaan sistem partai dominan di Singapura yang bahkan oleh Rodan dikatakan sebagai *state party*. PAP sebagai partai yang dibentuk oleh Lee Kuan Yew merupakan partai yang

selalu menduduki kursi pemerintahan Singapura. Hal ini diperoleh melalui jalur manipulasi hukum, inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pembatasan wacana publik serta membangun hambatan bagi partai oposisi. Sebagai partai yang sedang berkuasa, dalam sistem parlementer PAP memiliki keuntungan mempengaruhi sistem pemilihan umum dan memilih waktu pelaksanaan pemilihan (Mauzy, 2006 : 56). PAP sebagai partai yang berkuasa bersama dengan Lee Kuan Yew juga mampu membangun citra baik dirinya dengan menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, mampu menata perekonomian Singapura dengan baik serta meningkatkan standar hidup masyarakat Singapura.

Hal lainnya yang menunjukkan otoritarianisme Lee Kuan Yew adalah kebebasan media massa yang terbatas karena pemerintah melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap media masa baik itu media cetak maupun media elektronik. Melalui media masa tersebut, PAP mampu memenangkan pemilihan umum karena penyebaran kampanye *Fear Factors*. Beberapa bentuk *Fear Factors* (Kompasiana, 2011) yang umum digunakan antara lain:

- a. Pemerintah tahu siapa mencoblos partai apa sehingga rakyat menjadi takut untuk memilih partai oposisi dengan risiko dipecat dari pekerjaan, susah menyekolahkan anak serta tidak mendapat fasilitas rumah.
- b. Rakyat ditakut-takuti jika PAP kalah maka investasi asing akan lari.
- c. Rakyat ditakut-takuti jika PAP kalah maka Singapura akan menjadi negara miskin.

d. Siapapun yang mengkritik penguasa dengan keras akan berujung pada penjara, dibuang ke negara asing atau didenda jutaan dollar seperti tokoh oposisi sebelumnya.

Walaupun dikenal dengan sistem otoriternya, Singapura memiliki keunikan di mana dibalik sistem otoritarianisme yang diterapkan di Singapura, negara ini juga mengusung nilai-nilai demokrasi (disamping memang mengakui dirinya sebagai negara demokrasi parlementer) yang dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum dan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang cukup tinggi.

Kombinasi antara penerapan nilai demokrasi dan sistem otoriter melalui nilai lokal Asia inilah yang kemudian menjadikan Singapura dikatakan menjalankan *Hybrid Regime* atau demokrasi semu. Hybrid Regime ini menurut Ottaway, dikutip oleh Menocal (2007: 3) merupakan “sebuah sistem ambigu yang mengkombinasikan penerimaan terhadap retorika demokrasi liberal, keberadaan institusi demokrasi formal dan menghormati keterbatasan atas ruang lingkup publik dan politik dengan sifat dasar yang tidak liberal atau otoriter”. Melalui penerapan hybrid regime ini, pemerintah Singapura dengan otoritasnya dapat lebih mudah untuk menciptakan kesatuan masyarakatnya dalam rangka perwujudan stabilitas politik dan ekonomi disamping tetap menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan *style*-nya sendiri, selain itu penerapan *Internal Security Act* di dalam negerinya juga secara tidak langsung dapat mendukung proses untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa di Singapura.

4. Penerapan Internal Security Act Pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew

The Internal Security Act (ISA) adalah sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan keamanan internal bagi Singapura, dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah diberikan wewenang untuk menahan seseorang atau suatu kelompok dalam waktu yang tidak ditentukan. Adapun *internal security act* mengatur beberapa hal penting yang barangkali dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, tetapi pada kenyataannya seringkali hanya digunakan untuk membela kepentingan pemerintah. Efek penyimpangan itu dapat terjadi karena beberapa hal, mulai dari rumusan yang kabur (ambigu) sampai dengan hal-hal lain yang terjadi karena kedudukan pemerintah yang mendominasi dalam sistem kenegaraan maupun kedudukan PAP (*People Action Party*) dalam sistem politik Singapura

Hal lain yang juga turut mendukung adanya dominasi pemerintah Singapura terhadap rakyat ataupun pihak oposisi pemerintahan adalah isi-isi dari ISA itu sendiri yang memberi landasan dalam beberapa hal seperti penahanan terhadap seseorang yang dianggap berbahaya bagi kepentingan nasional, keamanan nasional, penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum tanpa melalui proses peradilan yang diatur dalam pasal 8 undang-undang ini (*Internal Security Act, article number 8*). Meskipun dalam teorinya, penahanan hanya dapat dilakukan selama-lamanya 2 tahun, namun penahanan tersebut dapat diperpanjang sampai jumlah yang tak

terbatas apabila didukung dengan aturan-aturan lain dalam *internal security act* ini.

Aturan inilah yang digunakan pemerintah Singapura untuk menahan Chia Thye Poh yang merupakan mantan anggota Parlemen dari partai oposisi Barisan Sosialis selama 23 tahun dari tahun 1966 hingga 1989 tanpa proses peradilan karena dia dianggap mendukung gerakan komunis untuk melawan pemerintah (Astaman, 2010:92). Padahal dia adalah seorang kandidat dari partai oposisi Barisan Sosialis yang akan maju sebagai calon dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1968.

Selain itu masih banyak pula kewenangan pemerintah dalam *Internal Security Act* yang mengarah pada pengerdilan nilai-nilai demokrasi seperti adanya larangan terhadap penggunaan tanda-tanda, seragam, pakaian yang dapat dikaitkan dengan gerakan politik (*Internal Security Act, article number 3*). Larangan ini juga berlaku bagi organisasi-organisasi yang menggunakan seragam dan juga organisasi yang menyerupai tentara, dimana *internal security act* ini memberi ancaman denda sebesar SGD 2000 atau hukuman penjara selama 2 tahun bagi mereka yang menjadi bagian dalam organisasi tersebut serta SGD 10000 atau hukuman penjara selama 5 tahun untuk mereka yang memimpin atau memberikan pelatihan bagi organisasi tersebut. (*Internal Security Act, article number 5*). Kewenangan lain yang dimiliki pemerintah adalah pemerintah dapat menutup sekolah atau lembaga pendidikan yang ada apabila dianggap mengajarkan ajaran yang tidak sesuai atau didasarkan pada ideologi tertentu serta kewenangan bagi aparat negara untuk menyatakan status daerah sebagai daerah aman

maupun berbahaya dan untuk itu aparat negara dapat melakukan penyelidikan atau penggeledahan tanpa surat perintah.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa *Internal Security Act* cenderung mengarah pada kewenangan absolut dari aparat negara, walaupun di dalam *internal security act* ini juga disebutkan tentang kompensasi kepada warganegara dan ancaman bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya. Namun tidak adanya kontrol publik, lemahnya *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara, dan konservatisme peradilan menyebabkan *internal security act* ini dapat menjadi instrument penting bagi pengerdilan nilai-nilai demokrasi. *Internal Security Act* nyaris memberi kewenangan yang bersifat non limitatif kepada negara.

5. Kesimpulan

Singapura sebagai sebuah negara kecil namun maju di Asia Tenggara, saat masa pemerintahan Lee Kuan Yew merupakan negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi liberal secara murni. Hal ini karena dalam pemerintahannya Lee Kuan Yew menggunakan *hybrid regime* yang dipengaruhi oleh *Asian Values* serta penerapan *Internal Security Act*, di mana penerapan hal-hal tersebut digunakan untuk melanggengkan posisinya serta partainya PAP sebagai pemimpin Singapura dengan alasan membentuk stabilitas politik dan ekonomi yang kini telah berhasil dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Astaman, Margareta. (2010). *After Orchard*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Caoili, Rachel. (2005). *Reflections on Democracy and Development in Southeast Asia: Why do the Philippines and Singapore Differ?*. The Bulletin of the Center for east – west Cultural & Economic Studies, Vol.6: Iss.2, Article 1
- Mauzy, Diane K. (2006). *The Challenge to Democracy: Singapore's and Malaysia's Resilient Hybrid Regime*. Taiwan Journal of Democracy, vol.2(2), pp. 47-48
- McCharty, Stephen. (2006). *The Political Theory of Tyranny in Singapore and Burma: Aristotle and the Rhetoric of Benevolent Despotism*. New York: Taylor & Francis e-library
- Menocal, A. et al. (2007). *Hybrid Regimes and the Challenges of Deepening and Sustaining Democracy in Developing Countries*. Dipresentasikan di Wilton Park Conference on Democracy and Development, 10-12 Oktober 2007
- Neher, Clark D. dan Ross Marlay. (1995). *Democracy and Development in Southeast Asia*. Boulder: Westview

Sumber Website:

- McCharty, Terry. (1999). *Lee Kuan Yew*, diakses melalui <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2054444,00.html> pada hari Senin, 16 April 2012 pukul 22:15 WITA
- Pemilu Singapura: PAP Peroleh 60% Tapi Sabet 93% Kursi Parlemen* (2011), diakses melalui <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/05/08/pemilu-singapore-pap-peroleh-60-tapi-sabet-93-kursi-parlemen-362191.html> pada hari Kamis, 12 April 2012 pukul 14:50 WITA
- Internal Security Act*, diakses melalui <http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p?page=0;query=DocId%3A%225ba26ddb-fd4c-4e2e-8071-478c08941758%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#legis> pada hari Kamis, 12 April 2012 pukul 20:15 WITA